

BAB I
PENDAHULUAN

Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada tanggal 25 Mei tahun 2009 ini, hingga dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 dan sikap keras Korea Utara dengan resolusi-resolusi yang dikeluarkan DK-PBB merupakan salah satu alasan utama penulis memilih judul “*Penolakan Korea Utara terhadap Resolusi DK-PBB Nomor 1874*” sebagai judul skripsi. Korea Utara dengan pengembangan teknologi nuklir dan uji coba yang dilakukannya telah berhasil menciptakan ketegangan baru di Semenanjung Korea dan sekitarnya, Korea Utara bukanlah Negara yang mudah menyerah dengan keadaan walaupun embargo dunia internasional semakin diperketat menyusul peluncuran rudal-rudal balistik yang dilakukannya selama tahun 2009 ini. Bahkan jalan damai yang diambil untuk menyelesaikan masalah nuklir tidak mengubah pandangan Korea Utara untuk tetap mempertahankan nuklirnya. Apabila tekanan-tekanan seperti embargo keuangan yang datang dari PBB dan Negara-negara yang mendukung penghentian pengembangan nuklir Korea Utara semakin meningkatkan intensitasnya, Korea Utara mengancam akan meningkatkan juga pengembangan nuklirnya sebagai reaksi atas sanksi-sanksi yang yang diterima negaranya.

Program nuklir yang dikembangkan Korea Utara banyak menimbulkan keresahan dan kerugian bagi Korea Utara sendiri maupun dunia internasional

terutama Negara-negara anggota DK-PBB. Program nuklir Korea Utara ini mengakibatkan kawasan Asia Timur menjadi rawan konflik dan kestabilan keamanan kawasan dan internasional menjadi terancam. Korea Utara dengan teknologi nuklirnya yang semakin hebat membiarkan begitu saja rakyatnya kelaparan dan hanya bisa mengandalkan bantuan dari luar, sedangkan PBB dan Negara-negara yang ikut terlibat dalam usaha penghentian program nuklir Korut yang berusaha menjaga kestabilan keamanan internasional atas krisis nuklir yang terjadi di kawasan Asia Timur harus bekerja lebih keras agar keamanan internasional tetap stabil meskipun krisis nuklir masih merebak.

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini Korea Utara sering muncul di pemberitaan akibat uji coba nuklir yang dilakukannya. Bagaimana tidak, nuklir bisa menjadi senjata pemusnah massal yang tentunya mengancam kestabilan keamanan dunia internasional. Berawal dari pembangunan reaktor nuklir model Uni Soviet pada tahun 1960an oleh Korea Utara dengan alasan hanya bertujuan untuk penelitian yang dilakukan di daerah Yongbyeon yang kemudian seiring berjalannya waktu hal tersebut meningkat menjadi isu krisis nuklir yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan kestabilan kawasan dan internasional tentunya karena krisis nuklir ini telah menjadi isu internasional. Hal tersebut dikarenakan ketergantungan Pyongyang terhadap ekspor senjata, yang akan tetap memunculkan ancaman serius bagi upaya untuk

mengendalikan semakin meluasnya penyebaran senjata “nuklir global” yang pastinya menimbulkan reaksi dari masyarakat internasional.

Krisis nuklir Korea Utara mulai terbongkar sekitar tahun 90-an dan kembali pecah pada tahun 2002, selain karena dilakukannya kembali proyek pengembangan nuklir secara rahasia dan karena skala ekonomi yang tidak besar dan skala hubungan ekonomi Korea Utara dengan Dunia Internasional yang tetap kecil. Krisis ini berimplikasi pada kebijakan politik luar negeri Korut dan Amerika Serikat, dimana AS menghentikan pasokan bantuan bahan bakar minyak ke Korea Utara yang ditanggapi dengan penolakan inspeksi dari PBB dan memindahkan semua peralatan pemantauan fasilitas nuklirnya ke wilayah Yongbyeon.

Korea Utara atau *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) yang merdeka pada tanggal 9 September 1948 ini merupakan Negara pecahan dari Semenanjung Korea atau Chosun (dalam bahasa Korea) yang terpecah menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan akibat Perang Dunia II. Dari sejak tahun 1945, setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh Amerika Serikat dan pengakuan Jepang atas kekalahannya. Korea berada dibawah tekanan kekuasaan AS menyusul kepergian pasukan Jepang dan merapatnya tentara AS di pantai Timur Selatan Korea hingga Semenanjung Korea terbelah menjadi dua dan pemerintahan militer Amerika Serikat menguasai, Korea tetap berusaha mempertahankan kesatuan Semenanjung Korea meskipun di bawah tekanan AS.

Pada saat itu, belahan Utara Semenanjung Korea mulai melaksanakan pemerintahan militer dibawah Uni Soviet. Usaha penyatuan Negara dan bangsa Korea oleh rakyat Korea Selatan dihalang-halangi oleh pemerintahan militer Amerika Serikat di Korea Selatan karena pada saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan sekutu dan pembagian Semenanjung Korea tersebut telah ditetapkan dalam perundingan sekutu. Oleh sebab itu pemerintah militer Amerika Serikat terus membujuk pemerintah dan rakyat Korea Selatan untuk memihak Amerika Serikat dan menerima pembagian Semenanjung Korea.¹

Korea Utara ini merupakan Negara sosialis komunis yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan sendiri yang dikelilingi oleh Negara-negara dengan ekonomi liberal. Korea Utara bersikap tertutup, bersikeras dengan program nuklirnya dan bersikap keras dengan resolusi-resolusi dan sanksi-sanksi baru bukanlah tanpa alasan melainkan tidak menginginkan adanya intervensi dari Negara lain terhadap negaranya meskipun dengan konsekuensi terisolasinya Negara ini dari dunia luar. Oleh karena itu pula Korea Utara mengembangkan teknologi nuklir yang bertujuan selain untuk menjaga keamanan rezim, keamanan dalam negeri dan menekan dunia barat juga sebagai pemenuhan energi yang dibutuhkan (KEDO). Namun dengan adanya uji coba nuklir bawah tanah yang telah mereka lakukan menimbulkan keresahan tidak hanya di kawasan Asia Timur tapi juga dunia internasional, karena dampak dan ancaman

¹ Yang Seong Yoon, Mohtar Mas' oed, *Politik Ekonomi Masyarakat Korea*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007. Hal 29

yang telah dan akan muncul pasca uji coba tersebut dapat mengancam keamanan dan memunculkan konflik keamanan yang cukup serius.

Situasi internal yang meningkat di Korea Utara menciptakan ancaman internasional akan nuklir Korea Utara. Cina dan Uni Soviet merupakan dua Negara yang dekat dengan Korea Utara, apalagi dengan terjalinnya hubungan diplomatik antara ketiganya. Bahkan Korea Utara mendapat bantuan dari Uni Soviet dalam bidang militer, ekonomi dan teknologi. Namun, runtuhnya Uni Soviet hingga berakhirnya perang dingin berdampak pada masalah perekonomian Korea Utara, dimana hampir semua Negara mementingkan kepentingan ekonominya daripada ideologinya. Hal ini berimbas pada penurunan bantuan ekonomi yang ditujukan pada Korea Utara dari Negara-negara lain hingga perekonomian Korut jatuh.

Korea Utara merupakan Negara miskin, hal tersebut diperkuat oleh beberapa faktor seperti semakin menurunnya perekonomian Negara dengan hilangnya strategi perdagangan dengan Uni Soviet, ketidakmampuannya mengimport barang-barang yang bisa menopang industri negaranya dan kekurangan energi yang dialami apalagi dengan terjadinya bencana alam besar-besaran hingga Korea Utara secara resmi meminta bantuan masyarakat internasional. Semuanya itu didukung juga dengan keputusan Korea Utara untuk mengisolasi negaranya dari dunia luar sehingga perekonomiannya tidak berkembang.

Seperti yang sempat disinggung diatas bahwa pembangunan fasilitas nuklir Korea Utara memiliki tujuan dimana salah satunya untuk memenuhi kebutuhan akan

energi listrik. Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang melakukan perundingan supaya Korea Utara dapat mengatasi kekurangan energi. Akhirnya usul pembentukan KEDO atau Organisasi Pembangunan Energi di Semenanjung Korea diwujudkan, dan memutuskan untuk membangun sebuah stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir di kawasan Korea Utara. Akan tetapi Korea Utara tak henti-hentinya menggunakan kartu nuklir dan peluru jarak jauh secara agresif.²

Merupakan suatu hal yang tidak lazim, sebuah Negara dengan teknologi nuklir yang canggih ini harus mengandalkan bantuan dari luar untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, diperparah dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan DK-PBB kepada Korea Utara yang tentu saja memperburuk perekonomian Korea Utara. Namun dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan seperti itu dan ketergantungannya terhadap bantuan-bantuan dari pihak luar, Korea Utara masih tetap memprioritaskan kebijakan meningkatkan kemampuan militer dan pengembangan program nuklir untuk menghadapi kemungkinan ancaman yang datang dari Negara-negara lain. Karena bagi Korea Utara militer memiliki kedudukan yang sangat dihormati tidak hanya di Korea Utara tapi juga di dunia internasional. Dan dengan memiliki senjata nuklir yang sangat meresahkan dunia internasional tersebut suatu negara dapat meningkatkan *prestige*, dapat *survive* dan mampu mempengaruhi negara lain.

² Mohtar Mas' oed, Yang Seung Yoon. *Memahami Politik Korea*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, cetakan pertama Februari 2005. Hal 244.

Uji coba yang dilakukan dalam bulan Mei 1993, Korea Utara melakukan uji coba penembakan rudal Rodong-1, dengan perkiraan jarak tembak hingga 1000 km, ke arah laut Jepang.³ Disusul peluncuran rudal balistik melewati wilayah udara Jepang yang dinyatakan sebagai peluncuran satelit pada Agustus 1998, kemudian Oktober 2004, Juli 2006 dengan roket berjenis Nodong-2 scud B dan Taepodong II dan kemudian belum lama ini adalah uji coba nuklir pada 25 Mei 2009 yang dilakukan Korea Utara, kecaman dari dunia internasional yang ditujukan pada Korut atas uji coba nuklirnya terus berdatangan hingga lahirnya resolusi-resolusi DK-PBB.

Pertama adalah Resolusi 1695 Dewan Keamanan PBB menetapkan sanksi-sanksi yang mengharuskan semua negara mencegah pengiriman barang-barang yang berkaitan dengan rudal ke atau dari Korut.⁴ Sekitar hampir tiga bulan disahkannya Resolusi Nomor 1695, pada 9 Oktober 2006 Korut melakukan uji coba nuklir bawah tanah hingga akhirnya kembali ditetapkan Resolusi untuk Korea Utara, yaitu Resolusi 1718 yang disahkan pada 14 Oktober 2006 yang berisi tentang larangan bagi Korea Utara melakukan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan program nuklir dan pengembangan senjata pemusnah massal termasuk pengiriman senjata dari dan ke Korea Utara.

Pada bulan Juli 2007 Korea Utara mulai menutup fasilitas nuklirnya di Yeongbyeon hingga meyakinkan AS untuk mencabut Korut dari daftar negara-negara

³ www.kapanlagi.com

⁴ *Nuklir Sebagai Alat Diplomasi (Diplomasi Koersif Korea Utara Dalam Politik Internasional)*
<http://fisip.unand.ac.id/hi/blog/?p=260>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2009.

pendukung teroris. Namun hal tersebut juga tidak berlangsung lama karena pada bulan April 2009 Korea Utara kembali meluncurkan roket jarak jauhnya.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) memutuskan untuk menambah dan menegaskan sanksi atas Korea Utara (Korut) setelah negara itu melakukan uji nuklir kedua, akhir Mei lalu. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara anonim dengan hasil suara bulat, Jumat 12 Juni 2009.⁵ Resolusi tersebut adalah Resolusi DK-PBB 1874, dikarenakan proyek pengembangan nuklir Korea Utara yang tetap dijalankan dan uji coba nuklir yang berlangsung pada 25 Mei 2009. Uji coba nuklir yang berlangsung pada bulan Mei 2009 tersebut telah melanggar resolusi-resolusi sebelumnya. Desakan DK-PBB terhadap Korea Utara untuk segera mengakhiri program senjata nuklir dan peluru kendalinya malah ditanggapi Korut dengan melancarkan provokasi.

Penolakan dan kecaman dunia internasional terhadap program nuklir Korea Utara terutama anggota DK-PBB yang menyetujui lahirnya resolusi-resolusi yang berisikan sanksi-sanksi yang tidak memihak Korea Utara seperti embargo-embargo ekonomi, larangan perdagangan, perundingan-perundingan dan negosiasi-negosiasi untuk membahas penghentian pengembangan senjata nuklir Korea Utara serta desakan terhadap Pyongyang untuk mencabut keputusannya menarik diri dari Traktat Non-proliferasi Nuklir (NPT) yang dilakukan Korea Utara pada tahun 2003 lalu apalagi dengan lahirnya resolusi baru DK-PBB 1874 yang notabene memiliki sanksi

⁵ http://dunia.vivanews.com/news/read/66277-dk_pbb_tetapkan_sanksi_baru_untuk_korut.

lebih berat dari resolusi-resolusi sebelumnya seperti larangan bagi Korea Utara untuk melakukan ekspor-impor senjata dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal laut dan pesawat milik Korut yang mencurigakan, tidak membuat Korea Utara bergeming, bahkan mereka mengancam akan meluncurkan rudal dan melakukan serangan balik sebagai reaksi dari provokasi yang dilakukan PBB maupun dari negara-negara yang menolak pengembangan nuklir Korea Utara terutama Amerika Serikat.

Korea Utara berpendapat bahwa memiliki senjata nuklir adalah hak dari negara-negara berdaulat agar dapat mempertahankan kebebasan bangsa, keamanan dan mencegah terjadinya perang. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan suatu penegasan bahwa Korea Utara menolak resolusi DK-PBB yang dikeluarkan pada 12 Juni 2009 di markas besar PBB, New York dengan suara bulat yaitu Resolusi DK-PBB Nomor 1874. Dimana inti dari Resolusi tersebut adalah memperkeras sanksi terhadap Korea Utara berupa pengetatan embargo senjata dan larangan-larangan baru berkaitan dengan keuangan seperti larangan ekspor import senjata.

Kubu Korea Utara pun sudah mendengar ancaman sanksi itu. Bukannya takut, Korea Utara mengancam akan melakukan aksi militer jika Amerika Serikat dan sekutunya memaksakan *blockade* sesuai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB).

Kantor berita resmi Korut, *Korean Central News Agency* (KCNA) mengutip pernyataan Departemen Luar Negeri Korut yang menyatakan akan memulai proses pengayaan uranium dan mengubah seluruh plutonium mereka menjadi senjata.

“Korut tidak akan menghentikan program nuklirnya dan kini sedang memproses ulang tabung bahan bakar yang telah digunakan,” kata Departemen Luar Negeri Korut, Sabtu 13 Juni 2009, seperti dikutip *Voice of America* (VOA).⁶

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah: **“Mengapa Korea Utara Tidak Menghentikan Program Nuklirnya Sesuai Dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874?”**

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan:

1. Memberikan gambaran mengenai alasan-alasan Korea Utara menolak Resolusi DK-PBB Nomor 1874 dan terus melanjutkan program nuklirnya meskipun merugikan Korea Utara sendiri.
2. Menjelaskan apa saja kepentingan nasional Korea Utara sehingga mereka sangat mempertahankan nuklirnya, meskipun tekanan dan desakan dari negara-negara internasional terus berdatangan bahkan semakin diperketat.

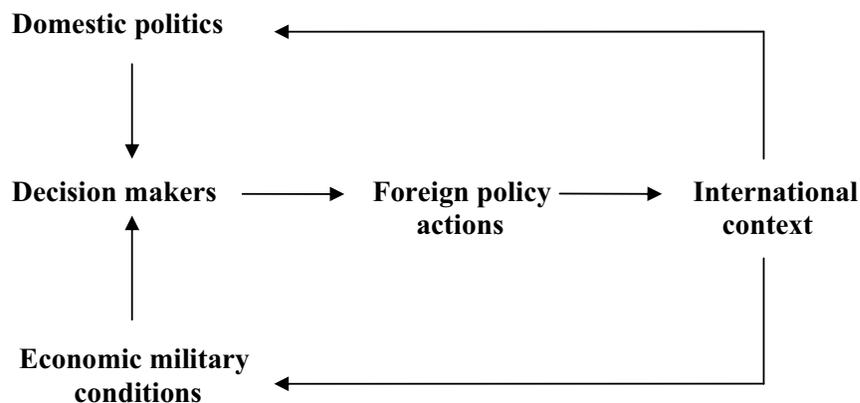
⁶ <http://www.surya.co.id/2009/06/14.eresolusi-terbaru-dk-pbb-embargo-korut-diperluas.html>.

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pengambilan Keputusan

Menurut William D. Coplin pengambilan keputusan adalah orang-orang yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan pengaruh dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut keterlibatan negaranya dalam pergaulan dunia. Dalam menentukan tindakan politik luar negerinya merupakan akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer dan yang ketiga, konteks internasional.⁷

Gambar 1.1
Interaksi antara faktor-faktor dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri



Sumber: William D. Coplin, *Pengantar Politik Internaional: Suatu Telaah Teoritis*.

⁷ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional Suara Telaah Teoritis*, (terj), Sinar baru, Bandung, 2003, hal 30.

Diagram diatas menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan keputusan luar negeri, pemerintah selaku aktor pembuat keputusan mempertimbangkan kondisi politik dalam negeri, ekonomi, militer dan konteks internasional dalam membuat keputusan yang ditujukan kepada negara lain. Berikut ini merupakan penjelasan singkat dari ketiga faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut William D. Coplin dan relevansinya terhadap kebijakan Korea Utara terutama dalam faktor ekonomi dan militernya.

a. Politik Dalam Negeri (*Domestic Politics*)

William D. Coplin mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh kondisi *Domestic Politics*, dimana si pembuat keputusan sebagai aktor dipengaruhi nilai rasional dan psikologis dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Kondisi dalam negeri memiliki pengaruh dalam menentukan *output* kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk budaya dan sistem politik. *Domestic politics* termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Selain itu, pembuatan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi politik dalam negerinya yang tengah dihadapi. Dimana banyak analisis politik internasional berargumentasi bahwa konsekuensi-konsekuensi yang mempersatukan dari krisis internal menyebabkan para pengambil keputusan luar negeri yang dihadapkan pada instabilitas di dalam negeri, menjadi agresif di luar negeri.

Korea Utara adalah negara yang menganut ideologi Juche (percaya dan bergantung pada kekuatan sendiri). Ideology Juche ini merupakan ideologi politik dalam negeri yang menjadi suatu ciri khas dari pemerintahan domestik Korea Utara, yang merupakan peninggalan dari pemerintahan Kim Il-sung “Presiden Abadi”, pendiri dan juga presiden pertama Korut. Setelah wafat kekuasaan Kim digantikan oleh Kim Jong Il (anak Kim Il-sung).

Korea Utara ini bisa dibilang salah satu negara yang memberikan *appreciate* tinggi pada pemimpinnya. Masyarakat melambangkan pemimpin sebagai perwujudan tekat dan keinginan partai dan menjadikannya sebagai pusat kekuatan untuk mengorganisir dan memimpin kegiatan sosiopolitik.

Sistem totaliterisme yang menghasilkan pemerintahan yang absolut menjadikan pemerintah bebas menentukan kebijakan tanpa harus memikirkan aspirasi maupun kehendak rakyat. Seperti keputusan Korea Utara untuk tidak mengindahkan Resolusi DK-PBB 1874 yang merupakan keputusan yang tidak mudah karena banyak yang harus dipertimbangkan dan harus siap menanggung konsekuensinya, entah itu berupa isolasi, maupun embargo-embargo yang akan semakin diperketat.

Hal tersebut terjadi pada pemerintahan Korea Utara dan terus berlangsung tanpa adanya protes dari masyarakat karena kepatuhannya terhadap pemimpin. Sebagai contohnya adalah pengembangan nuklir yang diyakini Korut dapat

meningkatkan *bargaining position*-nya di dunia internasional dan dapat menjamin keamanan rezim maupun negaranya.

b. Kondisi Ekonomi dan Militer (*Economic Military Conditions*)

Faktor ini sangat mempengaruhi kemampuan diplomasi suatu negara. Dimana kondisi ekonomi dan militer selalu menjadi pertimbangan dalam pertahanan dan keamanan karena berpengaruh terhadap kekuatan menekan yang harus dimiliki dalam hubungan luar negerinya. Negara-negara yang mempunyai kemampuan militer yang kuat akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam pergaulannya dengan negara lain.

Kebijakan isolasi Korea Utara menyebabkan perekonomian mengalami stagnansi, apalagi dengan runtuhnya Uni Soviet yang berdampak pada terisolasinya Korut dalam segi politik maupun ekonomi. Korea Utara bergantung pada bantuan luar negeri sejak pertengahan 1990-an karena keterbatasan ekonomi, bencana besar, ditambah lagi dengan sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan DK-PBB.

Salah satu penyumbang terbesar di Korea Utara adalah Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara yang rutin memberikan bantuan kepada Korea Utara. Tercatat bahwa Korea Selatan sering mengirim bantuan berupa pangan sebanyak 400.000 ton beras serta 300.000 ton pupuk bagi Korea Utara setiap tahunnya

dalam bentuk pinjaman.⁸ Bantuan-bantuan yang diberikan kepada Korea Utara diharapkan agar pemerintah Korea Utara mampu mengatasi masalah perekonomiannya sendiri, dimana salah satu akibatnya adalah bencana kelaparan.

Dengan keadaan perekonomian yang semakin memburuk tidak membuat Korea Utara memutuskan untuk menghentikan pengembangan nuklirnya. Karena Korut menyadari bahwa nuklir adalah salah satu atau bisa dibilang satu-satunya kebanggaan yang mereka miliki dalam kemampuan militer yang sangat berpengaruh besar di dunia internasional, dimana nuklir dapat digunakan untuk menjaga keamanan rezim negaranya meskipun dalam pengembangannya tidak sesuai dengan keadaan perekonomian Korea Utara yang terpuruk.

Program pengembangan senjata nuklir Korea Utara dinilai mampu mengancam ketentraman dan stabilitas keamanan internasional. Oleh sebab itu, beberapa Negara di dunia khususnya Amerika Serikat dan Negara-negara sekutunya di kawasan Asia Timur meminta DK-PBB untuk memberikan sanksi terhadap Korea Utara berupa embargo ekonomi dan militer. Hal tersebut sangat berbeda dengan India dan Cina, dimana kedua Negara yang sama-sama memiliki persenjataan nuklir ini tidak mendapat tekanan ataupun upaya intervensi dari dunia internasional dan PBB dalam mengembangkan persenjataan nuklir di negaranya. Dikarenakan sikap 'manis' mereka yang memasukkan nuklirnya kedalam NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) serta tidak menjadikan nuklirnya sebagai

⁸ <http://mediaindonesia.com/index.php>

persenjataan militer yang kemungkinan besar bisa menjadi senjata pemusnah massal.

NPT atau Program Penghentian Pengembangbiakan Nuklir ini merupakan suatu kesepakatan yang berisi tentang pelarangan pengembangbiakan dan kepemilikan nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Korea Utara sebenarnya telah bergabung dengan NPT pada 12 Desember 1985 tapi pada tahun 2003 Korut memutuskan untuk keluar dari *Treaty* tersebut dan menjadi satu-satunya negara yang keluar dari *Nuclear Non-proliferation Treaty* karena kecewa dengan ketidakmampuan NPT melindungi keamanan dan mengakui kedaulatan Korea Utara.

Keadaan perekonomian Korea Utara yang semakin memburuk berimbas juga pada masalah dana pemenuhan kebutuhan militer sehingga militer yang semakin melemah akan berdampak buruk pada kekuatan rezim Kim Jong-il dan berdampak kurang baik bagi kemampuan *bargaining* Korea Utara terhadap negara lain. Walaupun secara ekonomi Korea Utara sangat lemah, namun di bidang militer, Korea Utara memiliki kekuatan terbesar keempat di dunia.⁹

Dari segi militer, Korea Utara memiliki kemampuan militer yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Korea Utara mempunyai kekuatan militer sebesar 1.111.000 personil dengan perincian 1.000.000 Angkatan Darat, 40.000 Angkatan Laut dan 70.000 Angkatan Udara. Kekuatan darat tersebut

⁹ Harian Suara Merdeka

disusun dalam 60 divisi/brigade infantry, 25 brigade infantry mekanik, 13 brigade tank, 24 brigade khusus dan 30 brigade artileri anti serangan udara. Sementara Angkatan Laut Korea Utara terdiri dari 445 kapal perang (Fregat, PSK, MTB), 22 kapal selam, 310 kapal bantu, dan lebih dari 100 hovercraft. Kekuatan Angkatan Udara terdiri dari 850 pesawat tempur taktis, 480 pesawat pendukung, serta 290 helikopter. Korea Utara memiliki sekitar 5,5 juta pasukan cadangan dan 100.000 pasukan khusus.¹⁰

Strategi nasional Korea Utara dibawah pemerintahan Kim Jong-il memiliki tujuan memelihara rezim dan membangun ekonomi nasional dengan memobilisasi militer. Konsep yang mementingkan militer dalam politik menunjukkan bahwa Korut sadar militer merupakan aset yang paling kuat dan dapat dimobilisasi secara efektif, dengan dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ekonomi dan keamanan rezim. Kebijakan politik Korea Utara tersebut memiliki tujuan untuk membangun negara yang kuat, yang kebal dari ancaman invasi asing.

Konsep 'sistem yang mengutamakan militer' tampil pertama kali sejalan dengan pembentukan sistem rezim Kim Jong-Il. Perkataan 'militer yang terutama' sempat juga digunakan sebelumnya, dan berlanjut hingga setelah kematian Kim Il-sung. Kim Jong-il pernah mengungkapkan konsep itu dengan pernyataan yang hampir sama seperti 'pikiran revolusional yang mementingkan militer' dan 'militer yang memimpin partai dan rakyat' melalui media massa Korea Utara. Sistem itu

¹⁰ http://lesperssi.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id+10.pdf.

tampil sebagai moto utama nasional setelah sebuah pidato yang disampaikan oleh Kim Jong-Il pada Oktober 1997, dimana dia mengatakan bahwa “bagaimanapun sulitnya keadaan ekonomi, maka hal yang paling diutamakan adalah militer dan yang lainnya akan dipertimbangkan kemudian”.¹¹

Hal tersebut membuktikan bahwa di Korea Utara, militer memiliki kedudukan yang sangat dihormati begitu juga di dunia internasional. Karena dengan militer yang kuat, suatu negara dapat meningkatkan *prestige*, *survive* dan pengaruhnya terhadap negara lain menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan militer yang dimiliki tersebut, Korea Utara memanfaatkannya untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan keamanan rezim. Militer yang kuat sesuai dengan anggapan Korea Utara bahwa hal yang paling penting dalam politik adalah militer. Yakni kegiatan politik yang secara aktif mendorong revolusi dan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan kekuatan militer.

c. Konteks Internasional (*International Context*)

Menurut William D. Coplin konteks internasional itu adalah masalah-masalah internasional, dimana diterangkan bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkaran internasional yang ditetapkan sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif. Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Yang mempengaruhi kondisi

¹¹ http://world.kbs.co.kr/indonesian/evtent/nkorea_nuclear/general_02d.htm. 28 Des 2009

eksternal terhadap politik luar negeri suatu negara yaitu, geografis, ekonomis, dan politis.

Dalam memahami kasus politik luar negeri, masalah awal yang harus lebih dulu dijelaskan adalah unsur kepentingan nasional dan kekuatan nasional suatu negara yang bersangkutan. Dengan kata lain dapat dianggap bahwa politik luar negeri adalah penyeimbang atau pemenuhan selisih antara kuantitas dan kualitas kepentingan nasional dan kekuatan nasional.¹²

Politik luar negeri Korea Utara yang selama ini cenderung tertutup menyebabkan Korea Utara menjadi negara yang terkucilkan dari pergaulan internasional. Dimana hal ini menyebabkan kondisi ekonomi dan sosial Korut semakin memburuk. Diperparah dengan adanya embargo internasional akibat keberadaan fasilitas dan aktivitas nuklir yang berbasis plutonium.

Menyadari perekonomiannya yang semakin terpuruk, Korea Utara membuat keputusan menandatangani kerangka kesepakatan non-proliferasi nuklir dengan Amerika Serikat pada Oktober 1994. Dan sebagai imbalannya, Korut harus membekukan fasilitas nuklirnya untuk mendapatkan ganti berupa pembangunan reaktor air ringan (LWR) dan pemberian bantuan minyak dari KEDO yang beranggotakan AS, Jepang, Korea Selatan dan Uni Eropa. Keempat negara tersebut merupakan negara yang menentang adanya aktivitas nuklir di Korut,

¹² Tulus Warsito, *Teori-teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasan, Kebijakan Pemerintah Indonesia Keluar Dari OPEC tahun 2008*, HI FISIPOL UMY, Yogyakarta 2009. Hal 17

tetapi tetap memberikan bantuan dengan harapan Korut akan melunak dan menghentikan program pengembangan nuklirnya.

Penerapan kebijakan yang cenderung tertutup, sikap kerasnya terhadap resolusi-resolusi dari DK-PBB dan tetap mempertahankan program nuklirnya menjadikan perekonomian Korut tidak dapat berkembang secara optimal. Kebijakan nuklir Korea Utara bukannya tanpa alasan, karena dengan nuklirnya Korut dapat meminimalisir intervensi negara lain, keamanan rezim terjamin, menjaga keamanan dalam negeri dan menekan dunia barat juga sebagai pemenuhan energi yang dibutuhkan. Namun, dengan adanya uji coba nuklir bawah tanah 25 Mei 2009 yang lalu menimbulkan keresahan dunia internasional akan munculnya konflik keamanan internasional yang cukup serius.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹³

Konsep kepentingan nasional ini merupakan konsep dasar yang digunakan dalam pembahasan politik luar negeri suatu Negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dan Negara muncul dalam pergaulannya dengan Negara-negara dan bangsa

¹³ Jack C. Plano & Roy Olton. *KAMUS HUBUNGAN INTERNASIONAL*. (terj.), Cv. Putra A Bardin, Agustus 1999. Hal 7

lain baik secara bilateral maupun multilateral, dalam ruang lingkup regional maupun global. Dalam pergaulan internasionalnya, suatu Negara minimal akan berupaya untuk mendapatkan keuntungan agar kepentingan nasionalnya dapat tercapai. Arti minimum dari kepentingan nasional sendiri adalah kelangsungan hidup atau kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi identitas fisik, politik, dan budayanya dari gangguan negara-negara lain.

Pengertian kepentingan nasional suatu negara bisa juga tergantung dari sumber daya alam yang tersedia untuk dapat memaksa atau meyakinkan negara lain untuk bekerjasama dalam suatu wadah, dimana semua negara memiliki kepentingan masing-masing. Konsep kepentingan nasional ini berkaitan dengan adanya cita-cita serta tujuan dari suatu negara, yang berusaha dicapai melalui hubungan kerjasama yang solid dan harmonis dengan negara lain.

Dalam hal ini konsep kepentingan nasional dimaksudkan untuk menjelaskan kepentingan nasional Korea Utara, tidak terkecuali Negara-negara penggagas resolusi dan dunia internasional pada umumnya sehubungan dengan dikeluarkannya resolusi-resolusi DK-PBB yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemerintahan Korea Utara. Korea Utara sebagai salah satu Negara di dunia yang memiliki teknologi nuklir selalu mendapatkan teguran karena tindakan uji coba nuklirnya yang tentunya juga memiliki kepentingan sendiri atas pengembangan nuklirnya selain untuk menjaga keamanan negaranya sendiri juga untuk memenuhi kepentingan negara terutama kebutuhan penduduknya yang bisa dibilang terlantar

karena program pengembangan nuklir Korea Utara ini berimbas juga pada perkembangan ekonomi.

Telah dijelaskan diatas bahwa kepentingan nasional merupakan unsur vital bagi suatu negara. Negara yang memiliki motto “bagaimanapun sulitnya keadaan ekonomi, maka hal yang paling diutamakan adalah militer dan yang lainnya akan dipertimbangkan kemudian” ini, merasa dengan memiliki militer yang kuat maka kemampuan untuk melindungi keamanan rezimnya juga lebih besar sehingga Korut tidak mudah diintervensi negara lain dan keutuhan negaranya tetap terjaga sehingga kelangsungan hidup bangsa dan negara tetap terjaga.

Dengan teknologi nuklir yang memiliki jangkauan luas, militer Korea Utara semakin berkembang, walaupun perkembangan program nuklirnya tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Korea Utara yang semakin memburuk. Namun, bukan berarti Korea Utara mengabaikan perekonomian negaranya sendiri dengan adanya program nuklir. Hal tersebut dibuktikan dengan pengembangan nuklir itu sendiri, yang oleh Korea Utara dimanfaatkan agar bantuan dari negara lain yang berhubungan dengan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan rakyat Korea Utara tetap mengalir.

Kepemilikan senjata nuklir Korut ini setidaknya akan membuat Negara-negara lain berpikir dua kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat mengancam dan melakukan provokasi terhadap Korea Utara. Mereka harus ekstra hati-hati dalam menerapkan sanksi untuk menghindari serangan balik dari Korut

karena dikhawatirkan negara komunis ini akan menggunakan kemampuan militer dan meluncurkan rudal jarak jauhnya sebagai reaksi dari tindakan yang dilakukan Negara lain untuk melakukan perlawanan. Sedangkan kepentingan Negara-negara lain, terutama negara-negara anggota DK-PBB adalah untuk menjaga kestabilan keamanan dunia pada umumnya dan Semenanjung Korea pada khususnya selain untuk menjaga keamanan negaranya masing-masing. Karena itu, mereka juga mempertimbangkan apakah sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada Korea Utara akan memunculkan reaksi lebih keras.

Negara adalah sebuah entitas politik terorganisasi yang dianggap mampu mengambil tiga tindakan penting yaitu:

- Keputusan-keputusan sehubungan dengan lingkungan eksternal dan internalnya
- Mobilisasi sumber-sumber daya untuk menjalankan keputusan yang telah diambil
- Aplikasi instrument dan teknik untuk mendukung keputusan

Tindakan-tindakan tersebut yang berhubungan dengan lingkungan eksternal maupun internal diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Makna yang tersirat dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Menurut pandangan Hans J. Morgenthau syarat

minimum suatu Negara adalah kemampuan untuk melindungi identitas fisik, politik dan budayanya dari gangguan Negara lain.¹⁴

3. Konsep Kekuatan Nasional

Menurut Morgenthau dalam mencapai kepentingan nasional juga diperlukan adanya kekuatan nasional. Kekuatan nasional menurut Morgenthau meliputi: geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintahan.¹⁵

Unsur kekuatan nasional secara tunggal tidak dapat menentukan potensi Negara atau kemampuan perang dengan Negara lain. Kebanyakan faktor kekuatan nasional bersifat relatif dikaitkan dengan faktor waktu dan kekuatan yang dimiliki Negara lawan dan perkiraan terhadap kapabilitas nasional yang mengabaikan pertimbangan sifat perbandingan unsur kekuatan dapat membahayakan keamanan bangsa. Efektifitas kekuatan nasional yang dipergunakan untuk dipakai dalam mencapai tujuan Negara terutama sekali bergantung pada bagaimana para pemimpin Negara mampu mengintegrasikan dan mengendalikan unsur-unsur kekuatan nasional dalam menjangkau sasaran. Kapabilitas nasional juga bergantung pada bagaimana Negara lain menaksir unsur-unsur yang dimilikinya serta memperkirakan tindakan berdasarkan perkiraan tersebut. Dalam jaman nuklir, senjata pemusnah masal telah

¹⁴ lib.atmajaya.ac.id/default.aspx.Diakses pada tanggal 19 Oktober 2009

¹⁵ H.J Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, direvisi oleh Kenneth W. Thompson, ed. V, buku 1, Yayasan Obor Indonesia, 1990, hal.180-218.

memberikan kepada Negara nuklir kekuatan yang tiada tara, namun karena kemampuan destruktifnya mencegah pemakaian persenjataan tersebut.¹⁶

Geografis Korea Utara yang berdekatan dengan Negara-negara besar seperti Korea Selatan, Jepang dan Uni Soviet yang juga termasuk Negara-negara pendukung resolusi DK PBB mengenai pengembangan nuklir Korut ini sangat berpengaruh terhadap keamanan Negara dimana melibatkan juga kesiagaan militer Negara komunis tersebut. Dengan karakter masyarakat Korea Utara yang patuh dan tunduk terhadap pemimpin Negaranya, apalagi dibawah pimpinan Kim Jong-il Korea Utara mulai mengutamakan militer dengan memiliki strategi nasional “politik yang mengutamakan militer” terus berusaha meningkatkan kemampuan militer yang salah satunya dengan mengembangkan senjata nuklir.

Kekuatan militer dan nuklir merupakan dua hal yang memberikan keuntungan besar bagi Korea Utara, dengan dua kekuatan yang dimiliki tersebut, Korea Utara memanfaatkannya untuk mengatasi masalah ekonomi dan keamanan rezim sehingga kepentingan nasional dapat dicapai.

Kepentingan dalam politik internasional identik dengan kekuasaan (*“the concept of interest defined in the term of power”*).¹⁷ Secara lebih luas, Morgenthau menjelaskan bahwa setiap pengambil keputusan mengacu pada kekuatan yang ia miliki dalam menentukan kepentingan yang akan diambil. Semakin besar *power* yang dimiliki semakin besar pula *bargaining position*nya di mata dunia internasional.

¹⁶ *Op.cit.* hal. 20

¹⁷ <http://groups.yahoo.com/group/milis-kammi/message/21751>

E. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka dasar pemikiran yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat mengambil suatu hipotesa penolakan Korea Utara atas Resolusi DK-PBB Nomor 1874 adalah sebagai berikut.

1. Kondisi politik dalam negeri; dimana sistem pemerintahan Korut yang absolut membuat pemerintah bebas menentukan kebijakan tanpa mempedulikan aspirasi rakyatnya. Termasuk sikap Korea Utara terhadap Resolusi-resolusi DK-PBB yang memperburuk perekonomian Negara tersebut.
2. Keamanan wilayah Korea Utara bergantung pada kekuatan militer dan senjata nuklir yang dikembangkannya. Negara-negara dengan militer yang kuat akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam pergaulannya dengan Negara lain.
3. Korea Utara dapat mempertahankan kedaulatan negaranya dengan memanfaatkan nuklir sebagai alat pertahanan.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian tidak terlalu melebar. Batasan jangkauan dalam penelitian juga bertujuan agar penelitian lebih fokus. Dalam hal ini jangkauan penelitian dititikberatkan pada reaksi Korea Utara terhadap resolusi-resolusi yang dikeluarkan DK-PBB (resolusi 1695 dan

1718 pada tahun 2006), terutama resolusi terbaru DK-PBB nomor 1874 (pertengahan tahun 2009) yaitu setelah dilakukannya uji coba nuklir bawah tanah oleh Korea Utara. Namun tidak menutup kemungkinan digunakan data-data yang relevan dalam masa-masa sebelumnya sejauh data tersebut dapat mendukung penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai literatur. Referensi yang digunakan dari studi pustaka atas berbagai buku, surat kabar, jurnal-jurnal ilmiah, internet maupun dokumentasi lainnya yang dapat mendukung penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, meliputi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika penulisan, kerangka penulisan dan rencana kepastakaan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum Korea Utara dengan politik luar negerinya sehubungan dengan krisis nuklir dan riwayat nuklir Korea Utara hingga terjadinya krisis.

Bab III, dalam bab ini dijelaskan tentang resolusi-resolusi DK-PBB berkaitan dengan uji coba nuklir Korea Utara.

Bab IV, bab empat akan menjelaskan sikap dan kebijakan-kebijakan yang diambil Korea Utara terhadap resolusi-resolusi yang dikeluarkan DK-PBB dan peran militer dan nuklir Korea Utara terhadap resolusi DK-PBB.

Bab V, bab lima merupakan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya.